



**BERITA POLITIK DI MEDIA LOKAL: KONTEN ANALISIS TERHADAP BERITA PILKADA  
NTB 2018 DI LOMBOK POST DAN SUARA NTB**

POLITICAL NEWS IN LOCAL MEDIA: CONTENT ANALYSIS OF WEST NUSA TENGGARA  
ELECTION NEWS 2018 IN LOMBOK POST AND SUARA NTB

**Muhlis<sup>1</sup>, Hartin Nur Khusnia<sup>2</sup>, Eka Putri Paramita<sup>3</sup>, Muhd Ar. Imam Riauan<sup>4</sup>, Siti Chotijah<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mataram

Jalan Majapahit No. 62, Mataram, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Islam Riau

Jalan Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru, Riau, Indonesia

<sup>5</sup> STMM MMTTC Yogyakarta

Jalan Magelang KM 06 Sleman, Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup>email\_muhlis@unram.ac.id; <sup>2</sup>email\_hartinnkhusnia01@unram.ac.id; <sup>3</sup>email\_eparamita88@unram.ac.id;

<sup>4</sup>email\_imamriauan@comm.uir.ac.id; <sup>5</sup>email\_Mbakjhe@mmtc.ac.id

**ABSTRACT**

*There were four pairs of candidates running for West Nusa Tenggara Election 2018. They were Moh. Suhaili Fadil Thohir and Muh. Amin (number 1), Ahyar Abdu and Mori Hanafi (number 2), Zulkieflimansyah and Sitti Rohmi Djalilah (number 3), and Moch. Ali Bin Dachlan and Lalu Gede Muhamad Wirasakti Amir Murni or Ali-Sakti (number 4). Inevitably, they were competing for the publication space in the popular mass media in West Nusa Tenggara Province. However, the media were required to be fair in reporting all candidates. Any candidates were not allowed to control the publication on mass media. This study aimed to look at the fairness of two local media (Lombok Post and Suara NTB) in publishing all candidates of governor and vice governor in West Nusa Tenggara Province election 2018.*

*The method used in this research was quantitative content analysis with the purposive sampling. Technically, Lombok Post and Suara NTB newspapers were chosen because the two newspapers were the most popular in West Nusa Tenggara. Then, this research put the edition of February 15 – June 23, 2018, because the periods were the official campaign periods according to the West Nusa Tenggara Election Commission. Furthermore, the unit of analysis was selected referentially. All words that referred to the four pairs of candidates in the headlines on the front page (the most important part of the newspaper) were analyzed.*

*The results of this study indicated that both Lombok Post and Suara NTB were unfair in reporting (unbalanced) the four pairs of governor and vice governor candidates of West Nusa Tenggara election 2018. The two local newspapers seemed to favor certain pairs, namely Ali-Sakti. It could be seen from the coverage of the two newspapers on the headline page during the campaign periods of the election. In term of frequency, the two local newspapers reported Ali-Sakti pair more than their competitors.*

**Keywords:** Election, Local Media, Political News.

**ABSTRAK**

Pilkada Provinsi NTB 2018 diikuti oleh empat pasangan kandidat yaitu Moh. Suhaili Fadil Thohir dan Muh. Amin (nomor urut 1), Ahyar Abdu dan Mori Hanafi (nomor urut 2), Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (nomor urut 3), dan Moch. Ali Bin Dachlan dan Lalu Gede Muhamad Wirasakti Amir Murni atau Ali-Sakti (nomor urut 4). Tak pelak, mereka bersaing untuk memperebutkan ruang publikasi di media massa populer di Nusa Tenggara Barat. Namun, media juga dituntut untuk selalu bersikap adil memberitakan kandidat. Tidak dibenarkan ada kandidat yang menguasai publikasi di media massa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sisi keseimbangan dua media lokal (Lombok Post dan Suara NTB) dalam memberitakan atau mempublikasikan para kandidat gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif dengan penentuan sampling untuk tujuan tertentu. Secara teknis, Lombok Post dan Suara NTB dijadikan samping mengingat kedua koran tersebut paling populer di Nusa Tenggara Barat. Edisi yang dipilih adalah edisi 15 Februari – 23 Juni 2018 dengan pertimbangan periode itu adalah periode kampanye resmi sesuai ketetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB. Selanjutnya, unit analisis dipilih secara referensial artinya semua kata yang merujuk kepada empat pasangan kandidat gubernur

NTB 2018 yang menjadi judul berita di halaman depan (bagian paling utama dalam koran) menjadi bagian yang dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik Lombok Post maupun Suara NTB tidak adil dalam memberitakan (tidak berimbang) keempat pasangan kandidat yang bertarung pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pilkada Provinsi NTB 2018. Kedua koran lokal tersebut tampak berpihak kepada kandidat tertentu, yaitu pasangan Ali-Sakti. Hal ini terlihat dari pemberitaan kedua koran di halaman utama pada periode kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2018. Secara frekuensi kedua koran tersebut memberitakan pasangan Ali-Sakti jauh melebihi dari pasangan pesaingnya.

**Kata Kunci:** Pilkada, Media Lokal, Berita Politik

## 1. PENDAHULUAN

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 lalu. Empat pasangan kandidat bersaing untuk menduduki kursi gubernur dan wakil gubernur yang ditinggalkan oleh Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, M.A dan H. Muh. Amin, S.H. M.Si. Mereka yaitu H. Moh. Suhaili Fadil Thohir, S.H dan H. Muh. Amin, S.H. M.Si (pasangan nomor urut 1), TG. Ahyar Abdu dan H. Mori Hanafi, S.E (pasangan nomor urut 2), Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (pasangan nomor urut 3), dan H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Muhamad Wirasakti Amir Murni, LC., MA (pasangan nomor urut 4).

Untuk memenangkan pertarungan, para kandidat harus berupaya merebut hati rakyat agar mereka dipilih saat pemilihan berlangsung. Salah satu upaya yang paling menonjol adalah penggunaan media massa. Para kandidat dan partai politik yang bersaing biasanya secara intensif menggunakan media pada periode kampanye sebelum pemilihan berlangsung (Denis McQuail, 2010: 524). Mereka menggunakan media massa untuk menjangkau keberadaan publik yang tersebar. Melalui media massa, para kandidat bisa lebih dikenal oleh publik yang kelak diharapkan menjadi penyumbang suara.

Tak pelak, media massa pun menjadi arena kontestasi antar kandidat. Wajah para kandidat senantiasa tampil di media massa baik melalui iklan maupun berita politik. Melalui berita politik, para aktor politik berharap publik ikut terlibat dalam pembicaraan dan tindakan politik melalui pesan politik yang disampaikannya (Ibnu Hamad, 2004: 2). Dengan demikian, opini publik bisa terbentuk yang pada akhirnya bisa mempengaruhi pilihan politik khalayak. Ini lah yang menjadi dasar masing-masing kandidat berusaha untuk menguasai media massa. Mereka ingin menguasai ruang publikasi.

Di sisi lain, media massa tidak hanya sebatas sarana penyampaian pesan sebagaimana yang diharapkan oleh aktor politik yang ingin menggunakannya untuk menjangkau publik. Media juga merupakan pemeran aktif dalam menyampaikan pesan politik (Cook, dalam Katrin Voltmer: 2006: 7). Dalam konteks ini dikenal *framing*, media mempunyai kuasa untuk menentukan mana pesan yang layak ditampilkan dan mana pesan yang dihilangkan. *Framing* adalah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media (Eriyanto, 2002:66). Penyajian peristiwa dalam bentuk berita tidak lain adalah bentuk konstruksi atas realitas.

Penekanan peristiwa atau fakta yang lebih menonjol dari fakta lainnya merupakan hasil dari konstruksi atas realitas oleh media massa. Proses dan hasil pengonstruksian realitas sosial politik oleh media sangat bergantung pada dan ditentukan oleh perspektif dari sudut mana awak editorial memandang subjek yang diberitakan (Solatun Dulah Sayuti, 2014: 242). Dalam penyajian berita, awak media bisa dipengaruhi oleh banyak hal seperti pengetahuan atau preferensi personal. Tidak hanya itu, mereka tidak jarang harus berhadapan dengan

kepentingan ekonomi atau kepentingan politik. Akibatnya bisa berdampak pada kualitas karya jurnalistik yang dihasilkan.

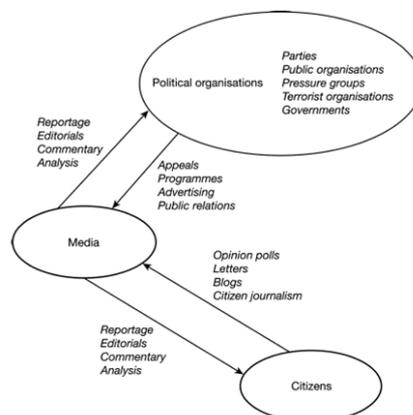
Penonjolan pada peristiwa tertentu akan membuat khalayak lebih mengingat peristiwa tersebut dibanding peristiwa lainnya. Dalam konteks berita politik, penonjolan pada kandidat atau partai tertentu akan menguntungkan kandidat tersebut. Mereka lebih dikenal dibanding kandidat pesaingnya. Namun, kondisi ini justru tidak baik bagi kehidupan demokrasi. Pemilih tidak mendapatkan informasi yang utuh terhadap semua kandidat. Efeknya, mereka tidak bisa menentukan pilihan secara rasional karena terbatasnya informasi yang tersedia. Hal inilah yang mendasari lahirnya tulisan ini.

Penulis ingin melihat bagaimana pemberitaan politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 di dua media lokal di Nusa Tenggara Barat yaitu Suara NTB dan Lombok Post. Tulisan ini diulas menggunakan analisis isi kuantitatif di mana sumber data berasal dari berita-berita yang secara jelas tersurat di media tersebut. Pemilihan dua media ini karena kedua media ini dinilai sebagai media lokal paling berpengaruh di NTB dan secara aktif memberitakan peristiwa politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat 2018. Fokus tulisan ini yaitu keberimbangan berita para kandidat gubernur dan wakil gubernur NTB menjelang pemilihan gubernur NTB 2018 di Lombok Post dan Suara NTB.

### 1.1. Tinjauan literatur

#### Media, Aktor Politik, dan Publik

Kajian komunikasi politik menitikberatkan pada tiga hal utama yaitu media, aktor politik, dan publik. Ketiga elemen komunikasi politik ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Relasi ketiganya saling memerlukan. Aktor politik memerlukan media untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada publik. Tanpa bantuan media, aktor politik tidak bisa menjangkau keberadaan publik yang tersebar dan heterogen. Di lain pihak, publik juga memerlukan keberadaan media. Media bisa menjadi sumber informasi bagi publik sekaligus kontrol atas pelayanan publik. Kajian komunikasi politik menitikberatkan pada tiga hal utama yaitu media, aktor politik, dan publik. Ketiga elemen komunikasi politik ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Relasi ketiganya saling memerlukan. Aktor politik memerlukan media untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada publik. Tanpa bantuan media, aktor politik tidak bisa menjangkau keberadaan publik yang tersebar dan heterogen. Di lain pihak, publik juga memerlukan keberadaan media. Media bisa menjadi sumber informasi bagi publik sekaligus kontrol atas pelayanan publik.



Sumber: Brian McNair (2011: 6)

Gambar 1. Elemen-Elemen Komunikasi Politik

Begitu sentralnya posisi media sebagai penghubung antara publik dan aktor politik membuatnya selalu menjadi rebutan, terutama bagi para aktor politik. Aktor politik tidak hanya sebatas politikus tetapi juga termasuk partai politik, lembaga pemerintah, legislatif, LSM, dan organisasi publik lainnya. Mereka selalu berebut untuk menguasai ruang publikasi di media massa. Perebutan oleh aktor politik berlangsung sepanjang waktu. Di hari biasa aktor politik menggunakan media massa untuk mempublikasikan ide, gagasan, atau kegiatan lainnya. Publikasi ini diharapkan bisa membangun citra positif sekaligus menangkal citra negatif yang dialamatkan kepadanya.

Perebutan ruang publikasi di media semakin meningkat menjelang hari pemilihan, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, berlangsung. Terutama bagi politisi yang berkeinginan maju di pemilihan, mereka berebut untuk tampil di media. Mereka selalu ingin tampil di halaman depan sesering mungkin untuk media cetak dan di jam *prime time* dengan durasi lama untuk media elektronik. Tujuan tampil di media massa untuk memperkenalkan diri kepada publik. Cara ini dilakukan karena terbatasnya ruang untuk bertemu langsung kepada khalayak. Harapannya tidak lain agar para politisi tersebut dipilih saat pemilihan berlangsung.

Lazimnya, tampil di media melalui dua cara. Pertama, melalui berita. Biasanya awak media akan tertarik meliput dan memberitakan peristiwa politik menjelang pemilihan. Beberapa media bahkan menyediakan ruang khusus berita politik menjelang pemilihan, semisal ruang kandidat, Pilkada, dan sejenisnya. Hal-hal yang selalu menjadi materi berita politik seperti pernyataan politik, aktor politik, program politik, daya tarik elektoral kandidat, dan sejenisnya. Selain liputan awak media, sang aktor politik bisa membuat berita sendiri melalui pres rilis untuk dikirim awak media.

Kedua, melalui iklan. Media massa umumnya mengandalkan sumber pembiayaan dari iklan. Oleh karena itu, media akan dengan senang hati mempublikasikan iklan politik. Tidak heran banyak iklan politik bertebaran di media massa saat periode kampanye berlangsung. Namun, konsekuensi publikasi menggunakan media periklanan ialah biaya. Sang aktor harus bersedia mengeluarkan biaya yang cukup untuk beriklan. Implikasinya, hanya aktor-aktor politik yang memiliki dukungan finansial yang kuat akan mendominasi periklanan politik di media massa.

Di sisi lain, keberadaan media massa bukanlah barang pasif. Media bisa memilih mana yang bisa dipublikasikan dan mana yang tidak bisa dipublikasikan. Memang, awak media tentu menyadari fungsi dasar keberadaan media seperti fungsi informatif, edukatif, hiburan, dan kontrol sosial. Namun demikian, ada faktor lain yang bisa mempengaruhi pilihan media. Faktor tersebut terutama kepentingan politik pemilik dan kepentingan ekonomi. Dua kepentingan terakhir ini bahkan sering kali menjadi faktor dominan untuk menentukan arah konten media. Tak jarang karena faktor kepentingan politik dan ekonomi, media lebih memprioritaskan kandidat tertentu dibanding kandidat lainnya.

### **Pers Partisan versus Pers Non Partisan**

Era demokrasi meniscayakan keberadaan pers. Karena fungsinya yang begitu signifikan, pers bahkan sering disebut sebagai pilar ke empat selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam struktur ketatanegaraan di negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini erat kaitannya dengan kekuatan pers dalam membentuk opini publik. Pers bisa menggiring masyarakat untuk bertindak sesuai pesan komunikator.

Dari sisi afiliasi politik, pers dapat dikategorikan dalam dua jenis. Pertama, pers partisan. Pers jenis ini adalah pers yang berafiliasi pada kelompok atau partai politik tertentu. Media

cetak partisan yang dimaksud adalah media cetak yang memberikan dukungan kepada seseorang, organisasi atau permasalahan tertentu dan menafikan kelompok atau golongan lain (Ruslan Ismail Mage, 2009: 77). Bentuk dukungan dilakukan dengan banyak cara. Cara paling umum adalah melahirkan pemberitaan yang lebih menonjolkan pihak tertentu. Media partisan selalu menyanjung dan memberitakan secara positif pihak yang menjadi afiliasinya sementara di sisi lain selalu diberitakan secara negatif.

Bentuk pemberitaan yang tidak berimbang atau lebih menonjolkan pihak tertentu secara tidak langsung memberikan dukungan kepada pihak tersebut. Publik yang terpapar berita jenis ini bisa terpengaruh, terutama bagi publik yang tidak memiliki informasi pembanding atau kurang kritis menyikapi permasalahan politik. Mereka lebih mengingat dan memiliki kesan positif terhadap pihak yang diuntungkan berita tersebut. Celakanya, pers partisan tidak jarang merekayasa fakta untuk mendukung pilihan politiknya dan di saat yang sama memojokkan lawan politiknya. Dampaknya adalah kualitas demokrasi yang menurun. Masyarakat tidak bisa menentukan pilihan secara rasional karena keterbatasan informasi.

Ruslan Ismail Mage (2009: 78) mengemukakan dua jenis pers partisan di Indonesia yaitu pers partisan yang muncul di era demokrasi dan dibentuk oleh partai politik dan pers partisan yang dari pers komersial umumnya di era otoriter. Pers bentukan partai politik dibuat untuk kepentingan politik. Pers-pers partisan jenis ini hadir untuk mendukung kerja partai politik yang menjadi afiliasi politiknya. *Amanat* milik PAN, *Siaga* milik Golkar, dan *Demokrat* milik PDIP adalah contoh pers partisan di era demokrasi.

Pers partisan yang muncul dari pers komersial umumnya dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan ekonomi. Pertimbangan ekonomi menjadi alasan pers komersial menjadi pers partisan tidak lain karena keinginan untuk bisa tetap bertahan hidup. Kondisi ini biasanya terjadi pada penerbitan pers menengah ke bawah yang selalu terkendala masalah biaya penerbitan (Ruslan Ismail Mage, 2009: 78). Mereka memerlukan biaya besar untuk tetap beroperasi. Pilihan untuk menjadi pers partisan didasari atas kepentingan untuk mendapatkan sokongan dana dari afiliasi politiknya. Tekanan politik juga kerap menjadi alasan awak media melacurkan diri dan menjadikan pers komersial umum menjadi pers partisan. Mereka tidak tahan dengan tekanan politik penguasa yang setiap saat memberikan ancaman atas beritanya yang kritis terhadap pemerintah.

Apa pun alasannya, keberadaan pers partisan menjadi duri dalam negara demokrasi. Pers partisan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati hak sipil dan persamaan di depan hukum. Pers partisan juga secara nyata melanggar prinsip-prinsip jurnalisme. Di dalamnya pers diharuskan menyajikan berita secara berimbang dan memberikan ruang yang sama kepada semua pihak yang berkepentingan. Pers partisan akan merusak tatanan demokrasi. Ia tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada warga negara melainkan justru akan mengantarkan rakyat menentukan pilihan politik yang keliru.

Kedua, pers independen atau pers non partisan. Pers independen adalah anti tesis dari pers partisan yang kehadirannya untuk melayani kepentingan afiliasi politiknya. Pers independen adalah pers atau media massa cetak yang di dalam pemberitaannya (tajuk rencana, opini, dan berita lainnya) benar-benar menyuarakan kepentingan masyarakat/umum, tanpa berpihak kepada seseorang atau kelompok kepentingan tertentu (Ruslan Ismail Mage, 2009: 93). Pers independen tidak terpengaruh oleh tekanan politik ataupun ekonomi yang mungkin melandanya. Ia tetap fokus bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat dengan menyajikan berita yang berkualitas dan berimbang.

Brian McNair (2011: 46) menyebutkan bahwa peran demokratis media terpenuhi bila jurnalis mampu mempertahankan objektivitas dalam melaporkan fakta tentang kepentingan publik. Objektivitas tersebut tercermin dari kemampuannya tidak mengaburkan antara opini dan fakta dalam pelaporannya. Jurnalis harus benar-benar bisa melaporkan fakta sebagaimana adanya. Permasalahan sering kali muncul karena adanya upaya untuk mengaburkan fakta dengan memasukkan unsur opini dalam pemberitaan. Opini inilah yang sering kali menjadi bias dan berimplikasi menguntungkan salah satu pihak.

Independensi pers bermakna tidak terikat oleh kepentingan apa pun. Iya hanya diikat oleh kepentingan publik. Mereka harus bekerja untuk melayani kepentingan publik, memberikan informasi yang benar, mengontrol jalannya kekuasaan agar tidak menyimpang, serta memastikan bahwa kelompok-kelompok yang berkepentingan mendapat porsi yang sama (berimbang) untuk diberitakan. Pemberitaan Pers independen menjunjung tinggi netralitas, mengedepankan etika jurnalistik, dan patuh pada regulasi yang mengaturnya.

### **Pers, Pilkada, dan Harapan Lahirnya Pemimpin Berkualitas**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana untuk mengganti pemimpin daerah secara legal. Pilkada digelar setiap lima tahun sekali. Tujuan menggelar Pilkada untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Provinsi NTB salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada serentak tahun 2018. Pilkada NTB diharapkan bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas yang akan mengemban amanah rakyat untuk periode 2018-2023. Pilkada NTB 2018 diikuti oleh empat pasangan kandidat. Mereka bersaing untuk menjadi orang nomor satu di NTB melalui pemilihan langsung yang digelar pada 27 Juni 2018.

Sebelum hari pelaksanaan pemilihan, ada masa kampanye bagi para kandidat. Mereka bisa menggunakan periode kampanye untuk merebut hati pemilih. Di masa kampanye tersebut, para kandidat bisa mengunjungi para pemilih untuk mengenalkan visi dan misinya, menawarkan program-programnya, atau sekedar menyapa pemilih agar lebih dikenal. Sejatinya periode kampanye ini penting tidak hanya bagi kandidat tetapi juga bagi pemilih. Pemilih perlu mendapatkan banyak informasi tentang semua kandidat dan program-programnya. Informasi ini menjadi bekal bagi mereka untuk menentukan pilihan secara rasional.

Permasalahan muncul karena keterbatasan waktu dan sumber daya lainnya di periode kampanye. Akibatnya, kandidat tidak mungkin bisa mengunjungi semua pemilih secara langsung. Jarak yang tersebar dan jumlah pemilih yang banyak juga menjadi alasan lain kandidat tidak bisa mengunjungi semua pemilih. Kondisi ini hanya bisa diatasi dengan menggunakan media. Melalui media, kandidat bisa menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada publik yang lebih luas. Banyak jenis media yang bisa jadi alternatif untuk menyampaikan pesan-pesan politik.

Namun perlu diketahui bahwa tidak semua media memberikan informasi yang berkualitas dan relevan bagi publik. Kehadiran media-media partisan justru hanya akan menggiring publik untuk melakukan partisipasi politik secara keliru. Oleh karena itu, media independen diharapkan benar-benar bisa hadir untuk melayani kepentingan publik. Hanya media independen yang menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik secara utuh bisa memenuhi kebutuhan publik atas informasi politik yang benar. Penerapan prinsip-prinsip jurnalistik tercermin dalam sembilan elemen-elemen jurnalisme karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001).

Pertama, kebenaran. Kewajiban pertama jurnalisisme adalah kebenaran. Dalam hal ini media wajib memberitakan fakta secara akurat. Manipulasi terhadap fakta sangat bertentangan dengan prinsip jurnalisisme. Kedua, loyalitas hanya untuk kepentingan konstituen. Awak media sering kali dibenturkan dengan kepentingan ekonomi. Keuntungan media menjadi pertimbangan dalam memproduksi berita. Hal ini keliru. Jurnalis harus fokus melayani kepentingan publik. Media tidak boleh tunduk pada kebijakan periklanan yang memaksa kualitas jurnalistiknya menurun. Wartawan harus tetap fokus melayani kepentingan publik, bukan kepentingan pengiklan atau pemilik media.

Ketiga, verifikasi. Ini erat kaitannya dengan kebenaran. Maksud verifikasi adalah bagaimana jurnalis harus senantiasa melakukan verifikasi terhadap data yang mereka dapatkan. Verifikasi penting untuk memastikan kebenaran berita yang mereka tulis. Keempat, independen dari faksi. Wartawan tidak lepas dari makhluk sosial yang punya relasi. Namun, relasi tersebut tidak boleh mempengaruhi karya jurnalistiknya. Mereka harus membuat berita terbebas dari kepentingan relasi atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Mereka harus bekerja untuk benar-benar mengungkap fakta yang sebenarnya. Kelima, memantau kekuasaan dan menyuarakan kaum tak bersuara. Elemen ini menekankan jurnalis untuk memantau kekuasaan. Dalam arti jurnalis harus mampu mengungkap setiap penyelewengan kekuasaan oleh penguasa. Selain itu, mereka juga harus menyuarakan kepentingan kaum lemah atau tertindas.

Keenam, jurnalisisme sebagai forum publik. Jurnalisisme harus mampu menghadirkan forum kritik dan komentar publik. Ini artinya awak media harus menyediakan ruang bagi publik untuk menyampaikan gagasan, masukan, atau kritik. Ruang ini bisa memperkaya pengetahuan publik. Ketujuh, menarik dan relevan. Elemen ini dalam dunia jurnalistik sering disebut sebagai salah satu nilai kelayakan berita. Peristiwa yang penting sekalipun tidak bisa menarik perhatian publik ketika penyajiannya tidak menarik dan relevan. Sebaliknya, hal yang kecil tetapi disajikan secara menarik bisa menarik perhatian publik. Oleh karena itu, peristiwa penting harus disajikan secara menarik dan relevan melalui kreativitas wartawan.

Kedelapan, komprehensif dan proporsional. Keterbatasan ruang pada media sering kali menjadi alasan laporan tidak utuh atau kurang mendalam. Namun, bagi jurnalis ini adalah tantangan yang mengharuskan mereka lebih kreatif membuat laporan proporsional dan komprehensif meski ruang yang terbatas. Terakhir atau kesembilan, kewajiban terhadap nurani. Setiap wartawan harus memiliki tanggung jawab personal untuk bekerja dan memastikan bahwa semua elemen-elemen tersebut terpenuhi. Kejujuran terhadap fakta adalah kunci tanggung jawab wartawan.

Terutama menjelang Pilkada, kebutuhan atas tersedianya informasi meningkat tajam, terutama berita politik. Hal ini penting mengingat informasi menjadi bekal bagi publik untuk menentukan pilihan politik yang rasional. Namun, kuantitas informasi saja tidak cukup tetapi kualitas dan akurasi informasi jauh lebih penting. Awak media punya tanggung jawab nurani untuk menghadirkan informasi politik yang memadai, akurat, berimbang, dan terbebas dari kepentingan politik jangka pendek.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Analisis isi kuantitatif adalah teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran isi dan menarik inferensi dari isi (Eriyanto, 2011: 15). Prosedur penelitian analisis isi ialah mengukur aspek-aspek

tertentu yang secara tersurat dari isi media dan menyajikannya secara kuantitatif. Kelebihan analisis ini dapat dilihat dari cirinya yang objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.

Tulisan ini untuk menggambarkan pemberitaan politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara 2018 di koran Lombok Post dan Suara NTB. Kedua koran ini adalah koran lokal paling berpengaruh dengan wilayah sirkulasinya di Nusa Tenggara Barat. Hipotesis yang diajukan adalah kedua koran tidak berimbang memberitakan keempat kandidat gubernur dan wakil gubernur NTB 2018. Ada kandidat yang diberitakan secara lebih menonjol atau lebih sering sementara lainnya kurang menonjol atau jarang diberitakan.

Dua media lokal dipilih sebagai sampel penelitian ini yaitu Lombok Post dan Suara NTB. Dasar pemilihan ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam sistem penarikan sampel *purposive*, peneliti secara sengaja memilih sampel atau periode tertentu atas dasar pertimbangan ilmiah (Eriyanto, 2011: 147). Sebetulnya ada cukup banyak media baik lokal dan nasional beredar di Nusa Tenggara Barat namun Lombok Post dan Suara NTB dipilih karena kedua koran tersebut adalah media lokal dan paling berpengaruh di Nusa Tenggara Barat.

Setelah ditentukan media yang menjadi sampel, langkah selanjutnya adalah penentuan edisi terbit. Lalu, edisi terbit yang dipilih adalah periode terbit antara 15 Februari – 23 Juni 2018. Semua edisi pada periode tersebut diteliti. Periode ini dipilih karena periode tersebut merupakan periode kampanye Pilkada Serentak 2018. Setiap kandidat diberikan waktu yang sama oleh penyelenggara Pemilu untuk melakukan kampanye pada periode tersebut. Lewat dari periode tersebut, tidak ada kandidat yang boleh melakukan kampanye.

Lalu, di edisi tersebut hanya berita politik yang berada di halaman depan yang dipilih untuk dianalisis. Pemilihan halaman depan karena pertimbangan logika jurnalistik. Halaman depan adalah halaman yang dianggap paling penting di antara halaman-halaman yang lainnya. Fokus penelitian ini adalah berita politik yang terkait dengan empat kandidat Pilkada NTB 2018 di halaman depan. Unit analisis yang dipakai adalah unit referensial. Penelitian ini mencatat semua kata yang merujuk kepada empat pasangan kandidat Pilkada NTB 2018 yang menjadi judul berita di halaman depan. Kata-kata tersebutlah dijadikan data untuk dianalisis menggunakan metode analisis isi.

Tulisan ini menganalisis pemberitaan keempat pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur NTB 2018 di Lombok Post dan Suara NTB. Fokus analisis dilihat dari judul berita yang ditarik secara referensial tentang keempat pasangan kandidat di halaman depan koran tersebut. Artinya, semua judul berita baik yang secara langsung atau tidak langsung merujuk kepada kandidat tertentu dikategorikan dalam unit analisis. Frekuensi kemunculan di halaman utama melahirkan keberimbangan atau ketidakberimbangan berita. Sebagaimana diketahui, dunia jurnalistik mengenal prinsip *cover both sides*. Artinya, media harus berimbang atau memberikan ruang yang sama kepada semua pihak untuk diberitakan. Ketidakberimbangan pemberitaan dinilai memberikan perlakuan khusus kepada kandidat tertentu dan itu mencederai prinsip jurnalistik yang harus dipegang teguh oleh media.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini mengulas pemberitaan empat pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018-2023 di koran Lombok Post dan koran Suara NTB. Titik tekan terletak pada judul berita di halaman utama di kedua koran tersebut pada masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat 2018. Unit analisisnya ditarik secara referensial artinya semua kata yang merujuk kepada keempat kandidat di judul pemberitaan di halaman utama dijadikan sebagai objek pembahasan.

### 3.1 Kandidat Gub dan Wagub NTB 2018 di Lombok Post

Lombok Post adalah koran lokal yang cukup intensif memberitakan kampanye politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 lalu. Lombok Post bahkan memberikan rubrik khusus untuk liputan Pilkada di Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 129 hari selama periode kampanye Pilkada 2018 yaitu, dimulai tanggal 15 Februari-23 Juni 2018, Lombok Post terbit sebanyak 115 edisi. 14 hari lainnya tidak terbit karena hari besar dan cuti bersama.

Rinciannya, Lombok Post terbit 13 edisi di bulan Februari, 29 edisi di bulan Maret, 29 edisi di bulan April, 28 edisi di bulan Mei, dan 16 edisi di bulan Juni. Meskipun demikian, tidak semua edisi koran Lombok Post memuat semua kandidat di halaman utama di setiap edisinya. Tulisan ini melihat berita politik yang mencantumkan secara jelas kandidat baik calon gubernur atau calon wakil gubernur di judul berita di halaman utama. Berikut gambaran berita terbitan Lombok Post selama periode kampanye di halaman utama.

Tabel 1. Pemberitaan politik Lombok Post di halaman utama pada periode kampanye Pilkada Prov. NTB 2018

Nama Kandidat	No. Urut	Edisi 2018					Frekuensi	Persentase
		Feb	Maret	April	Mei	Juni		
Ali-Sakti	4	12	52	59	60	32	215	98,7%
Zul-Rohmi	3	0	0	0	0	0	0	0%
Ahyar-Mori	2	2	1	0	0	0	3	1,3%
Suhaili-Amin	1	0	0	0	0	0	0	0%
		<b>14</b>	<b>53</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>218</b>	<b>100%</b>

Sumber: Diolah oleh tim peneliti

Data di tabel tersebut menunjukkan bahwa frekuensi pemberitaan Lombok Post tentang empat pasangan kandidat di halaman utama tidak berimbang. Lombok Post tampak lebih memihak kepada kandidat tertentu yaitu kandidat pasangan nomor urut satu, Ali- Sakti. Hal itu terlihat dari frekuensi kemunculan pasangan Ali-Sakti di judul berita Lombok Post di halaman pertama. Selama periode kampanye, pasangan Ali-Sakti muncul sebanyak 215 kali di judul berita Lombok Post di halaman satu. Perinciannya, 12 kali di bulan Februari, 52 kali di bulan Maret, 59 kali di bulan April, 60 kali di bulan Mei, dan 32 kali di bulan Juni.

Jumlah frekuensi terbit yang mencapai 215 kali ini melebihi dari jumlah edisi terbit Lombok Post selama periode kampanye yang hanya 115 edisi. Artinya, dalam satu edisi tidak jarang Lombok Post memunculkan judul pasangan tersebut lebih dari satu kali. Frekuensi kemunculan Ali-Sakti sebanyak 215 kali ini setara dengan 98,7% dari total frekuensi kemunculan seluruh pasangan kandidat. Pasangan urut ketiga atau Ahyar-Mori hanya muncul 3 kali atau setara dengan 1,3%. Pasangan ini muncul dua kali di bulan Februari dan satu kali di bulan Maret 2018. Terbitan Lombok Post edisi April, Mei, dan Juni 2018 tidak memunculkan pasangan Ahyar-Mori.

Sementara itu, dua pasangan kandidat lain bernasib lebih buruk. Pasangan Zul-Rohmi dan pasangan Zuhaili-Amin bahkan tidak pernah mendapat ruang pemberitaan sekalipun di halaman utama Lombok Post. Dengan demikian, persentase kemunculannya pasangan nomor urut satu dan empat di halaman utama pada periode kampanye di koran Lombok Post ini nol persen. Ketidakberimbangan pemberitaan ini akan berdampak tidak bagus buat masyarakat luas. Mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang komprehensif terhadap semua kandidat

yang bersaing melainkan hanya pada kandidat tertentu saja, terutama yaitu Ali-Sakti. Walaupun demikian, kondisi ini tidak otomatis berujung pada kemenangan pada kandidat yang lebih banyak diberitakan. Banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi kemenangan, misalnya rekam jejak, dukungan partai politik, kemampuan menggaet *influencer*, dan lain sebagainya.

### 3.2 Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 di Suara NTB

Sebagai koran umum, koran Suara NTB juga banyak mengulas berita politik, termasuk Pilkada NTB 2018 kemarin. Selama 129 hari periode kampanye, terbitan Suara NTB berhasil dihimpun sebanyak 91 edisi. Sementara 38 hari lainnya tidak dihimpun karena dua alasan yaitu: terbitannya tidak berhasil didapatkan dan memang tidak terbit. 6 edisi tidak berhasil didapatkan sementara 32 hari lainnya memang tidak terbit. Selain di hari besar, Suara NTB juga tidak terbit pada hari Minggu. Hal inilah yang mendasari Suara NTB tidak terbit dalam jumlah yang relatif banyak.

Rincian terbitan Suara NTB selama periode kampanye Pilkada NTB 2018 lalu adalah 11 edisi di bulan Februari. Tiga edisi tidak terbit karena bertepatan dengan 2 hari Minggu dan satu hari besar. Di Maret Suara NTB terbit sebanyak 24 edisi, satu edisi tidak berhasil ditemukan dan 6 hari lainnya tidak terbit. Di bulan April, Suara NTB terbit sebanyak 24 edisi, 6 edisi lainnya tidak terbit. Kemudian, jumlah terbitan harian Lombok di bulan Mei sebanyak 22 edisi, 9 edisi lainnya tidak terbit. Terakhir di bulan Juni, Suara NTB terbit sebanyak 10 edisi, 8 edisi tidak terbit karena hari Minggu dan cuti bersama untuk lebaran Idul Fitri. 5 edisi lainnya di Bulan Juni 2018 tidak berhasil ditemukan. Gambaran tentang pemberitaan keempat kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur pada masa kampanye Pilkada NTB 2018 di Suara NTB diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Pemberitaan Politik Suara NTB di halaman utama pada periode kampanye Pilkada Prov. NTB 2018

Kandidat	No. Urut	Edisi 2018					Frekuensi	Persentase
		Feb	Maret	April	Mei	Juni		
Ali-Sakti	4	14	42	39	32	16	143	72%
Zul-Rohmi	3	0	5	5	5	4	19	9,5%
Ahyar-Mori	2	5	12	11	8	0	36	18%
Suhaili-Amin	1	0	1	0	0	0	1	0,5%
		<b>19</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>199</b>	<b>100%</b>

Sumber: Diolah oleh tim peneliti

Tabel tersebut menunjukkan bahwa frekuensi pemberitaan pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada Pilkada NTB 2018 selama periode kampanye di harian Suara NTB tidak mengedepankan keberimbangan yang proporsional. Suara NTB cenderung berpihak pada pasangan Ali-Sakti. Hal ini terlihat dari frekuensi pemberitaan Ali-Sakti di Suara NTB. Koran tersebut lebih banyak memberitakan pasangan Ali-Sakti dibanding tiga pasangan pesaingnya. Sejak periode kampanye di bulan Februari 2018 sampai bulan Juni 2018, frekuensi pemberitaan Ali-Sakti selalu jauh lebih unggul dengan pesaingnya. Keunggulannya pun cukup signifikan. Secara keseluruhan Ali-Sakti menguasai pemberitaan di halaman utama Koran Suara NTB hingga 143 kali atau 72%. Suara NTB memberitakan pasangan Ali-Sakti di halaman utama dengan menyebut langsung nama Ali BD serta nama lain yang merujuk kepadanya. Nama lain tersebut adalah Amak Asrul dan Amak Elo.

Tiga pasangan lainnya hanya berbagi dari 28% yang tersisa. Pasangan Ahyar-Mori membuntuti Ali-Sakti di urutan kedua. Namun, jumlahnya tidak cukup signifikan. Pasangan tersebut hanya diberitakan sebanyak 36 kali atau 18%. Sementara itu, pasangan Zul-Rohmi yang ada di urutan ketiga diberitakan sebanyak 19 kali atau setara dengan 9,5%. Paling buncit adalah pasangan Zuhaili-Amin. Pasangan ini hanya diberitakan sebanyak 1 kali atau 0,5% dari total pemberitaan keempat pasangan kandidat tersebut yang sebanyak 199 kali. Artinya, selama periode kampanye, pasangan Suhaili-Amin hanya satu kali dimunculkan dalam judul berita di halaman utama. Sementara pasangan lainnya, Ali-Sakti sebanyak 143 kali, Ahyar-Mori sebanyak 36 kali, dan Zul-Rohmi sebanyak 19 kali.

Walaupun demikian, kondisi pemberitaan yang tidak berimbang tidak selalu berbanding lurus dengan hasil Pilkada. Artinya, pemberitaan yang lebih banyak kepada kandidat tertentu tidak secara otomatis berujung pada kemenangan pada kandidat tersebut. Banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi kemenangan, misalnya rekam jejak, dukungan partai politik, kemampuan menggaet *influencer*, dan lain sebagainya.

#### 4. PENUTUP

Jamak diketahui bahwa salah satu unsur yang harus menjadi perhatian media adalah keberimbangan dalam pemberitaan. Media dituntut untuk memberikan porsi yang berimbang kepada semua pihak atau kepentingan. Sama halnya dalam pertarungan politik. Media dituntut untuk selalu memberitakan secara berimbang pihak-pihak yang bertarung. Namun, kesimpulan yang bisa ditarik dari bahasan ini adalah baik Lombok Post maupun Suara NTB tidak memberitakan secara seimbang empat pasangan kandidat yang bertarung pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pilkada Provinsi NTB 2018. Kedua koran lokal tersebut tampak berpihak kepada kandidat tertentu, yaitu pasangan Ali-Sakti. Hal ini terlihat dari pemberitaan kedua koran di halaman utama pada periode kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2018. Secara frekuensi kedua koran tersebut memberitakan pasangan Ali-Sakti jauh melebihi dari pasangan pesaingnya.

Lombok Post memunculkan pasangan Ali-Sakti sebanyak 215 kali ini di halaman utama. Jumlah tersebut setara dengan 98,7 % dari total frekuensi kemunculan seluruh pasangan kandidat. Pasangan urutan ketiga atau Ahyar-Mori hanya muncul 3 kali atau setara dengan 1,3 %. Dua pasangan kandidat lain bernasib lebih buruk. Pasangan Zul-Rohmi dan pasangan Zuhaili-Amin bahkan tidak pernah mendapat ruang pemberitaan sekalipun di halaman utama Lombok Post. Begitu pula di koran Suara NTB, koran tersebut memberitakan pasangan Ali-Sakti di halaman utama hingga 143 kali atau 72 persen. Tiga pasangan lainnya hanya berbagi di 28 persen yang tersisa atau 56 kali. Pasangan Ahyar-Mori diberitakan sebanyak 36 kali (18%). Pasangan Zul-Rohmi diberitakan sebanyak 19 kali (9,5%). Paling buncit adalah pasangan Zuhaili-Amin. Pasangan ini hanya diberitakan sebanyak 1 kali (0,5) dari total pemberitaan keempat pasangan kandidat tersebut yang sebanyak 199 kali.

Pada hal, ketidakberimbangan pemberitaan oleh media tidak baik untuk masyarakat. Mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang komprehensif terhadap semua kandidat yang bersaing melainkan hanya pada kandidat tertentu saja, terutama yaitu Ali-Sakti. Walaupun demikian, kondisi pemberitaan yang tidak berimbang tidak selalu berbanding lurus dengan hasil Pilkada. Artinya, pemberitaan yang lebih banyak kepada kandidat tertentu tidak secara otomatis berujung pada kemenangan pada kandidat tersebut. Banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi kemenangan, misalnya rekam jejak, dukungan partai politik, kemampuan menggaet *influencer*, dan lain sebagainya. Hal ini pun terjadi di Pilkada Nusa Tenggara Barat

2018. Ali-Sakti yang banyak diberitakan di Suara NTB dan Lombok Post kalah dan Pilkada dimenangkan oleh pasangan Zul-Rohmi.

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Universitas Mataram atas support dan juga kepada kolega atas kerja sama yang baik sehingga tulisan ini selesai dan terpublikasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). *Elemen-Elemen Jurnalisme*. Jakarta: ISAI.
- Mage, R. I. (2009). *Industri Politik: Strategi Investasi Politik dalam Pasar Demokrasi*. Jakarta: RMBOOKS.
- McNair, B. (2011). *An Introduction to Political Communication*. New York: Routledge.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Sayuti, S. D. (2014). *Komunikasi Pemasaran Politik*. Bandung: Rosda.
- Voltmer, K. (Ed.). (2006). *Mass Media and Political Communication in New Democracies*. London: Routledge.